BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Di DIY, sektor pariwisata mengalami perkembangan yang cukup berarti. Program Sapta Pesona yang gencar di giatkan oleh pemerintah Indonesia, merupakan ajakan bagi para pelaku pariwisata di DIY agar wisatawan yang berkunjung mendapatkan 'kepuasan'. Produk-produk wisatanya merupakan ciri khas yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang keberbagai destinasi yang ada di DIY. Letak geografinya membuat DIY memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman budaya (adat istiadat) yang bervariasi. Kreatifitas dan keramahan penduduknya, membuat DIY sangat menarik dan eksotik untuk dikunjungi. Pada dasarnya wisatawan asing dan wisatawan nusantara merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan.

Sebagai *never ending industry*, atau industri yang tak mengenal akhir, pariwisata di DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2006 lalu, yakni sebesar 78.145 orang dan ditahun 2005 jumlah wisman sebesar 103.488.[1] Penyebab penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke DIY lebih disebabkan karena terjadinya gempa yang telah meluluhlantakkan semua sendi kehidupan di Yogyakarta, termasuk sektor pariwisata. Para wisatawan enggan untuk berkunjung ke DIY hingga beberapa bulan kemudian. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa

[1] *Statistik Kepariwisataan DIY 2006*, Baparda Yogyakarta, hal 15

keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu faktor penting bagi suatu daerah untuk menjadi sebuah destinasi utama bagi wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut.

Tentu saja hal ini menimbulkan efek domino yang cukup besar bagi sektor pariwisata DIY itu sendiri. Dan yang menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana menyikapi dampak dari gempa tersebut terhadap pariwisata DIY pada khususnya. Dalam hal ini tentu saja memerlukan sejumlah langkah strategis oleh pemerintah DIY, dengan tujuan untuk membangun kembali DIY menjadi wisata terkemuka di Indonesia setelah Bali; mengembalikan citra pariwisata DIY dan tentunya mengembalikan minat wisatawan untuk kembali berkunjung ke DIY seperti sedia kala.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah propinsi DIY dalam pemulihan pariwisata Jogja terutama mengembalikan minat wisatawan mancanegara pasca gempa Mei 2006 lalu. Dan kemudian penulis mengangkat sebuah judul ***"Strategi Pemerintah Propinsi DIY dalam Meningkatkan Arus Kunjungan Wisatawan Mancanegara Pasca Gempa 27 Mei 2006"*** sebagai salah satu permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran secara objektif mengenai pariwisata Yogyakarta yang memiliki potensi sebagai salah satu wisata internasional.
2. Mengetahui perkembangan pariwisata DIY terutama pasca gempa 27 Mei 2006.
3. Mengetahui berbagai tindakan dan langkah strategi yang diambil Pemerintahan Propinsi DIY untuk meningkatkan kembali arus kunjungan wisata ke DIY pasca gempa bumi 27 Mei 2006.
4. Menambah wacana keilmuan penulis.
5. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Permasalahan

Pariwisata dalam dua dasawarsa terakhir ini, oleh para ahli ekonomi telah digolongkan sebagai industri yang tidak mengeluarkan asap (the smokeless industry), yang dapat meningkatkan kemakmuran melalui pembangunan komunikasi, transportasi dan prasarana ekonomi yang lain yang ternyata dapat mengurangi pengangguran dalam negeri. Selain itu banyak pula orang mengatakan, bahwa pariwisata sebagai suatu faktor yang dapat menentukan lokasi industri dan sangat

menentukan dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin akan sumber-sumber alamnya.[2]

Pariwisata yang kita kenal sekarang merupakan suatu fenomena yang bukan relatif baru, dimana sejak pertengahan abad 19, pariwisata sebagai salah satu produk dari Revolusi Industri. Namun demikian, kegiatan wisata pada dasarnya telah dilakukan manusia sejak lama, yakni ketika pariwisata dianggap sebagai suatu aktivitas yang mulai tumbuh dan berkembang seiring dan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan manusia atau paling tidak setelah manusia itu mengenal kebudayaan. Sedangkan pariwisata sebagai suatu ilmu, baru mulai berkembang setelah Perang Dunia I sebagai akibat perubahan struktural yang berdasarkan campur tangan pemerintah dalam bidang kehidupan dan bertambah ramainya arus wisatawan, mendorong orang untuk mempelajari dan meneliti secara ilmiah baik faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pariwisata maupun faktor-faktor yang menghambatnya.

Beda halnya dengan kaum Developmentalis yang berpendapat bahwa pariwisata sebagai produk ekspor-impor yang unik karena pariwisata memiliki potensi yang memungkinkan menjadi elemen penting bagi suatu strategi pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Lebih dari peluangnya sebagai sumber devisa, industri pariwisata dipandang memiliki banyak elemen yang mendorong transformasi ekonomi Negara-negara itu dari karakternya sebagai masyarakat pertanian yang tradisional menuju masyarakat modern internasional.

[2] www.budpar.net/ berita budaya dan pariwisata (dan lainnya), akses 23 Maret 2008

Potensi perkembangan pariwisata internasional berfungsi sebabagai elemen strategis bagi pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang bahkan negara maju sekalipun. Berbicara mengenai pariwisata sama saja dengan membicarakan globalisasi karena pada dasarnya pariwisata tidak mengenal tingkat batas wilayah.

Sejak saat itu beberapa negara yang ada di dunia ini mulai menaruh perhatian terhadap kehidupan dan perkembangan pariwisata, karena telah didasari bahwa pariwisata bukan saja merupakan aspek kebutuhan kehidupan manusia yang bersifat naluriah dan alamiah, melainkan juga merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh devisa dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Demikian juga di Indonesia, istilah pariwisata baru dimulai pada awal tahun 1960-an. Istilah pariwisata diperoleh dari budayawan intelektual atas permintaan Presiden Sukarno (Bung Karno) kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Bung Sultan) selaku Ketua DTI (Dewan Tourisme Indonesia) di tahun 1960-an itu.[3]

Pariwisata di Indonesia mulai tampil ke depan sejak dibangunnya hotel-hotel besar Jakarta, Bali, Yogyakarta, Pelabuhan Ratu pada awal tahun 1960an. Kemudian disusul dengan hotel-hotel lain di berbagai kota besar di tanah air.

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata Internasional karena keelokan alam serta kekayaan budayanya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kebudayaan. Indonesia sebagai negara

[3] http://www.indomedia.com/bernas/9907/09/UTAMA/09bis1.htm, akses 8 Maret 2008

kepulauan terkenal memiliki kekayaan budaya dan alam yang sangat banyak dan mendapat nama sebagai negara *mega biodiversity.*

Indonesia yang berada di konstelasi ekonomi Asia Timur dan Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus dapat memanfaatkan peluang dunia pariwisata. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangkitkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Industri pariwisata Indonesia hingga pertengahan tahun 1997 berkembang dengan pesat bahkan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan devisa negara dan pendapatan daerah. Hampir satu dekade Indonesia yang kaya akan obyek wisata alam dan wisata budaya telah menikmati masa-masa keemasannya. Menurut penghitungan menggunakan metodologi dari World Tourism Organization (WTO) yaitu Neraca Satelit Pariwisata Nasional yang secara garis besar adalah pada tahun 2003 jumlah pendapatan dari kepariwisataan di Indonesia mencapai hampir Rp 125 trilyun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 7,52 juta orang.[4]

Pada kenyataannya, sektor pariwisata ini juga telah mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya di daerah-daerah tujuan wisata yang telah berkembang seperti Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu contohnya.

---

[4] *Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005-2009*, Departemen Kebudayaan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang terletak antara 110.00-110.50 Bujur Timur dan antara 7.33-8.12 Lintang Selatan, dengan luas wilayah 3.185,8 KM².[5] Yogyakarta dikenal sebagai salah satu destinasi dengan kekayaan budaya dan warisan budaya yang apresiasif. Kawasan candi Prambanan, kawasan Kraton Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat, Kawasan Kotagede dan bangunan-bangunan bekas peninggalan Belanda merupakan bukti kebesaran masa lalu yang masih bertahan hingga kini. Keanekaragaman ritual, kreatifitas seni dan keramah tamahan masyarakatnya, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan.

Begitu juga dengan kekayaan alam yang ada di DIY, merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya jual yang cukup tinggi. Kawasan Lereng Gunung Merapi yang dijadikan *the most active volcano in the world* dan juga oleh *the international decade disaster reduction* (IDNDR) ditetapkan sebagai *the decade volcano of the world* tahun 1944 (sama dengan gunung Etna di Italia),[6] kawasan Perbukitan Menoreh dengan perkebunan dan waduk Sermo-nya, kawasan pegunungan Seribu dengan potensi Karstnya, kawasan pantai selatan dengan potensi baharinya, serta kawasan gumuk pasir sebagai fenomena alam yang spesifik.

Fasilitas akomodasi berupa hotel berbintang dan non berbintang, restoran, sejumlah pusat perbelanjaan, biro perjalanan wisata, serta beberapa fasilitas

---

[5] http://www.bapeda.pemda-diy.go.id/tentang_yogya.php?PHPSESSID=af561c4348ae8b3934e0487561c8f62f, akses 22 Febuari 2008

[6] *Kedaulatan Rakyat*, hari Minggu 5 Juli 2005, hal.13

pertemuan dan pameran yang cukup baik dan berskala internasional seperti JEC, ditambah dengan tersedianya bandara internasional Adi Sucipto, membuat Yogyakarta sebagai daerah wisata yang layak untuk dikunjungi.

Pemerintah Propinsi DIY, selaku pemerintah Daerah Tingkat I berupaya untuk mengembangkan pariwisata dan budaya yang terdapat Propinsi DIY, dengan tujuan untuk menjadikan DIY sebagai tujuan wisata terkemuka pada tahun 2020. Berbagai efek globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi serta liberalisme perdagangan yang memicu persaingan ketat, mengharuskan dilakukannya reformasi strategi promosi secara mendasar. Sebuah konsep pariwisata yang memperhatikan kesetaraan jender dan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan serta menjaga kenyamanan wisatawan menjadi prioritas program-program yang diusung oleh pemerintah DIY.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, disebutkan bahwa penyelanggaran Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.[7] Dengan demikian, dimaksudkan bahwa setiap wewenang penyelenggaraan daerah kini lebih diserahkan kepada masing-masing daerah.

---

[7] *Undang Undang Otonomi Daerah 1999.* Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 54.

Dan hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menyatakan tentang kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom.[8] Pelaksanaan otonomi daerah menumbuhkan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi daerah masing-masing serta mengelola manfaat yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Disamping itu juga menimbulkan tantangan yang tidak kecil bagi daerah, merupakan tanggung jawab penuh bagi daerah untuk memajukan daerahnya dalam berbagai bidang, baik itu yang berkaitan dengan perekonomian, pembangunan, sosial budaya maupun bidang kepariwisataannya.

Budaya dan pariwisata merupakan aset bagi daerah, memberikan pendapatan yang tidak sedikit bahkan dibeberapa daerah di Indonesia, budaya dan pariwisata merupakan sumber utama pendapatan daerah. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengembangkan potensinya, termasuk didalamnya potensi kebudayaan dan kepariwisataannya. Dengan demikian, daerah harus dapat mengembangkannya secara mandiri dan profesional, baik itu dengan memanfaatkan program kemitraan antar daerah (dalam negeri) maupun kerjasama internasional dengan beberapa negara atau kemitraan kota dengan suatu negara (*Sister province/ State/ Prefecture* dan *Sister city*).

Adapun beberapa kerjasama internasional atau program kemitraan DIY dengan negara lain misalnya[9] ditahun 1985, kerjasama dibidang seni, budaya, Iptek,

---

[8] *Rencana Strategis Badan Pariwisata Daerah DIY 2004- 2008, op.cit,* hal 6
[9] *Laporan Kerjasama Luar Negeri Propinsi DIY,* Biro Kerjasama DIY

pariwisata, dll, antara Kyoto Prefecture (Jepang) dengan Pemprov DIY. Tahun 1999, kerjasama dengan negara Tyrol (Austria) dibidang ekonomi, perdagangan industri, pariwisata, pertanian, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan investasi. Tahun 2002, program kemitraan kota antara pemerintah kota Yogyakarta dengan City of Savannah, Georgia (Usa), terutama dalam hal pengembangan pariwisata, manajemen pelayanan publik dan manajemen keuangan daerah.

Beberapa program pengembangan kemitraan seperti yang dipaparkan diatas bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara Pemerintah (pusat-kabupaten/kota) swasta dan masyarakat serta pelaku industri budaya dan pariwisata di dalam maupun di luar negeri dalam bidang penelitian, sumber daya manusia, dan kelembagaan dan sekaligus mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya.

Dalam kerangka otonomi daerah, dapat disebut dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah maupun pemerintah daerah, adapun produk andalan pemerintah propinsi DIY yang menjadi prioritas untuk dikembangkan pemasarannya adalah trade, tourism, dan investment (TTI).

Adapun fokus pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata DIY lebih lanjut disebabkan karena sektor pariwisata dianggap sebagai lokomotif pembangunan. Ini terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta berpersentase sebesar 40 % dari pajak hotel dan restoran.[10] Hal itu menandakan

[10] *Nota Kesepakatan PPAS DIY 2008 – FINAL*, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal 11

bahwa semakin banyak wisatawan yang menginap di DIY, maka akan semakin tinggi pendapatan yang akan diperoleh. Pariwisata juga merupakan salah satu kegiatan padat karya dan padat modal, sehingga setiap wisatawan yang datang dapat memberikan lapangan kerja dari 1,25 hingga 1,75 orang. Artinya bila ada 100 wisatawan yang datang, maka ada sekitar 125 hingga 175 orang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Keseriusan pemerintah propinsi DIY untuk menjadikan DIY sebagai usaha kawasan pariwisata yang pada kenyataannya berpotensi untuk menjadi salah satu wisata internasional setelah Bali, tertuang dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 1988. Dan apa yang telah diupayakan pemerintah selama ini ternyata telah menjadikan Jogja sebagai Never Ending Asia yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah brand image propinsi yang berupaya menempatkan posisi baru Jogja sebagai "experience that never end in Asia". Visinya adalah untuk menjadikan Yogyakarta "the leading economic region in Asia for trade, tourism and investment".[11] Sedangkan misinya adalah untuk menarik, memberikan kepuasan, dan mempertahankan perdagangan, wisatawan, investor, pengembang dan organisasi dari seluruh dunia untuk tetap berada di Yogyakarta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pariwisata merupakan komoditi yang dapat dikembangkan dan dapat diandalkan sebagai salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dan tidak selamanya pula sektor pariwisata selalu berjalan sesuai dengan

[11] http://...sejarah2.html, akses 21 Februari 2008

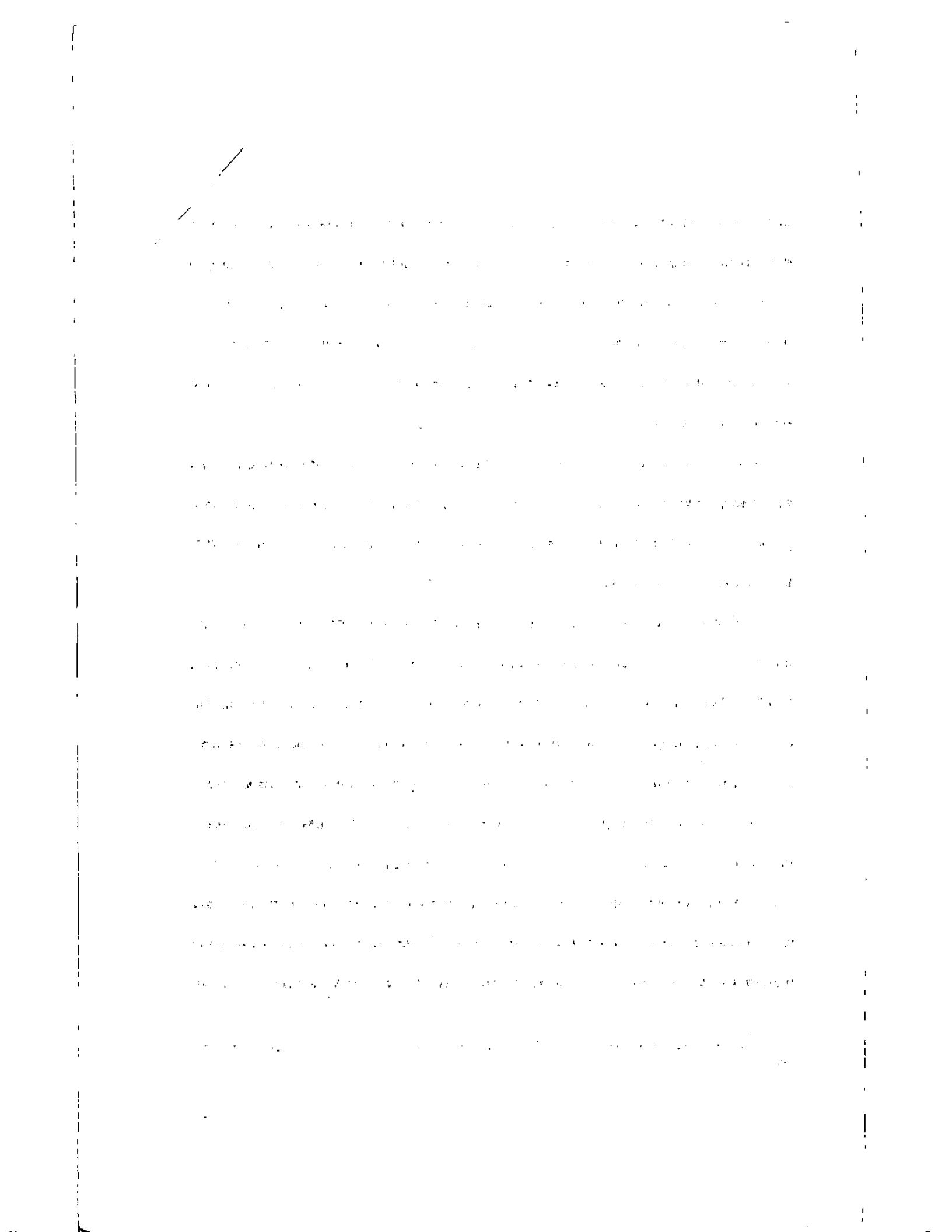

harapan, isu terorisme yang marak terjadi di Bali juga berdampak negatif pada pariwisata di Jogja. Para wisatawan takut dan khawatir bahwa Jogja dapat menjadi sasaran bom yang kedua setelah Bali. Begitu juga dengan travel warning, bahwa adanya larangan dari beberapa negara untuk melakukan sejumlah perjalanan ke Indonesia dikarenakan standar keamanan penerbangan Indonesia masih termasuk dalam kategori rendah. Bahkan akhir-akhir ini yang menambah daftar buruknya industri pariwisata adalah banyak terjadi bencana alam yang dapat menjadi salah satu faktor menurunnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Tetapi pada kenyataannya, gempa 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala richter telah menimpa dan meluluh lantakan semua sendi kehidupan DIY.

Gempa bumi tektonik dengan kekuatan 5,9 Skala Richter yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 tersebut, mengakibatkan laju perekonomian DIY terkontraksi 8,70%.[12] Hal ini lebih disebabkan karena menurunnya kinerja dua sektor unggulan DIY sebagai akibat terjadinya gempa bumi. Adapun dua sektor unggulan ini adalah : pertama, sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan hingga 2,37%.[13] Banyak pusat-pusat perdagangan mengalami kerusakan parah, bisnis perhotelan dan restoran lesu karena wisatawan enggan berkunjung dan adanya kekhawatiran adanya gempa susulan. Kondisi tersebut sebenarnya telah mulai terasa sejak Gunung Merapi dinyatakan status Awas. Kedua, sektor industri pengolahan menurun tajam hingga 9,31% karena beberapa sentra industri kerajinan gerabah di

[12] *Loc.,cit*

daerah Bantul, industri perak di Kotagede, industri kulit di Manding mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan bangunan maupun mesin-mesin produksi.

Dinamika kehidupan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasca gempa memang tidak berubah dibandingkan sebelumnya, tetapi ada beberapa sektor usaha yang harus 'menyingsingkan lengan bajunya' untuk bisa bertahan. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang menjadi unggulan di wilayah ini, ikut terkena imbas bencana gempa Mei 2007. Dampak gempa bumi yang menyebabkan sejumlah kerusakan bangunan cagar budaya yang secara tidak langsung menjadi obyek wisata bagi wisatawan mancanegara, seperti candi Prambanan, Kraton, Taman Sari, Bangsal Trajumas, Makam Imogiri, dll. Kerusakan terhadap prasarana fisik lainnya juga tidak bisa dihindari, baik jaringan telekomunikasi, listrik maupun transportasi, sehingga melumpuhkan sebagian besar sektor usaha pariwisata. Citra pariwisata Yogyakarta terpuruk, rusaknya beberapa obyek wisata membuat para wisatawan enggan datang hingga beberapa bulan setelah gempa. Padahal salah satu prasyarat sebuah negara/daerah menjadi sebuah destinasi wisata unggulan salah satunya karena dukungan keamanan dan kenyamanan infrastruktur jalan darat, laut dan udara yang memadai.[14]

Data di Baparda DIY menyebutkan bahwa angka kunjungan wisatawan mancanegara untuk tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup siginifikan yakni

[14] http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaDaerah&op=detail_berita_daerah&id=219, akses 22 Febuari 2008

sebesar 78.145 wisatawan, diantaranya 67.653 orang dengan lama tinggal 2,31 hari (yang menginap di hotel berbintang) dan 10.492 orang dengan lama tinggal 2,04 hari di hotel non berbintang. Sedangkan untuk tahun 2005, jumlah wisman yang ada di DIY sebesar 103.488 wisatawan, diantaranya yang menginap di hotel berbintang mencapai 92.273 orang dengan lama tinggal 2,41 hari dan 11.215 orang dengan lama tinggal 2,22 hari di hotel non berbintang.[15]

Yogyakarta yang tumbuh dan berkembang sebagai daerah wisata diawali sejak tahun 1970-an dalam dunia kepariwisataan. Yogyakarta pernah mendapat predikat sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali. Namun, kenyataan yang sekarang dialami adalah jauh dari mempertahankan predikat itu. Oleh sebab itu untuk mengembalikan citra Propinsi DIY sebagai the *second destination*, perlu adanya perbaikan di segala sektor yang berhubungan dengan industri ini. Mengingat sebagian besar masyarakat di Yogyakarta ataupun daerah sekitarnya juga menggantungkan kehidupan mereka di sektor pariwisata, baik itu usaha perhotelan, rumah makan sampai jasa pemandu wisata dan kerajinan. Maka dari itu, diperlukan berbagai langkah strategis serta kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Pemprov DIY baik ditingkat nasional (antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (multilateral, regional dan bilateral) untuk bisa memulihkan kembali pariwisata DIY.

[15] *Statistik Kepariwisataan DIY 2006*, BAPARDA DIY, hal 1 & 3

D. Rumusan Masalah

Dengan melihat situasi dan kondisi DIY yang dilematis pasca gempa 27 Mei 2006 lalu, ternyata membawa dampak yang cukup berarti bagi kehidupan pariwisata DIY tersendiri, terutama menurunnya animo wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke DIY.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut : **"Bagaimana strategi Pemerintah Propinsi DIY untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara pasca gempa 27 Mei 2006?"**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab dan menjelaskan langkah-langkah strategis Pemprov DIY dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara pasca gempa 27 Mei 2006, maka penulis akan menggunakan teori dan konsep yang sesuai dengan pembahasan diatas.

Adapun teori dan konsep yang digunakan yakni sebagai berikut :

1. Teori Public Policy

Menurut David Easton dapat dirumuskan sebagai berikut :

> "The authoritative allocation of value for the whole society but it turn out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society and everything the government choose to do or not to do result in the allocation of value"
> (Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat

dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan beberapa persen dari GNP-nya dan sejumlah hasil yang diproduksikan pemerintah setiap tahunnya kepada masyarakat).[16]

Berikut ini Model Sistem dalam Public Policy dapat di jelaskan dalam gambar sederhana dibawah ini:

Gambar 1.1 **Model Sistem dalam Public Policy**

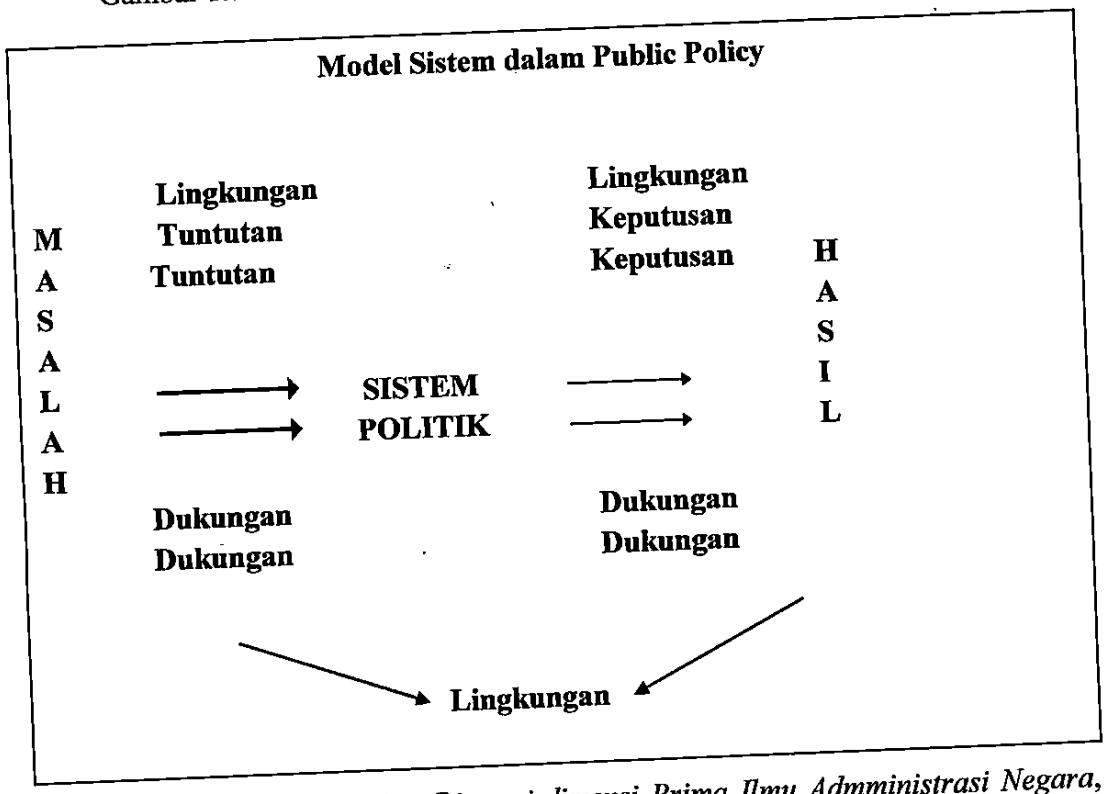

Sumber : Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Admministrasi Negara*, Citra Niaga Rajawali Pers, 1993

Selain itu, public policy dapat pula menangani aneka ragam cakupan substantif seperti pertahanan, kemanan, energi, lingkungan masalah luar negeri,

[16] Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Admministrasi Negara*, Citra Niaga Rajawali Pers, 1993, hal 117

pembangunan dan lain-lain. Public policy juga dapat mengatur dari masalah-masalah yang vital sampai dengan masalah-masalah yang kurang penting (trivial) dan dari alokasi anggaran yang jutaan rupiah sampai dengan sistem persenjataan mutakhir.[17]

Program-program yang berhubungan dengan masalah-masalah wilayah kerja yang bertanggung jawab pelaksanaannya adalah birokrasi, pejabat-pejabat politik (*Political Rules*) mencoba memilih dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat. Pemilihan itu dijadikan keputusan *policy*-nya. Jika suatu keputusan policy telah ditetapkan maka kemudian bergerak dari arena politik ke arena infrastruktur birokrasi. Demikian pula suatu sikap dan perilaku yang tertutup, keterbukaan persoalan yang dapat dijumpai setiap saat dalam lembaran-lembaran media massa, surat kabar, radio, dan televisi dari kampanye dan konferensi rapat-rapat komisi DPR, beralih ke situasi dan forum tertutup, misalnya rapat-rapat panitia proyek, rapat kerja departemen, seminar dan lokakarya yang terbatas dan banyak lagi yang intinya mencoba mengganti persoalan-persoalan pertanggung jawaban dan partisipasi dalam melaksanakan policy tersebut.

Sedangkan public policy ditetapkan karena persoalan-persoalan masyarakat senantiasa tumbuh dan cenderung jarang terselesaikan dengan tuntas, karena persoalan satu berkaitan dengan yang lainnya menunggu penyelesaiannya. Suatu persoalan kadang kala memerlukan penyelesaian dari sisi tinjauan. Dengan demikian semakin diketahui betapa sulitnya persoalan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

---

[17] *Ibid*, hal 61

Teori public policy juga mengemukakan adanya desakan-desakan ataupun tekanan-tekanan dari lingkungan yang sesuai dan dipandang sebagai masukan atau input yang akan menghasilkan kebijakan yang pada akhirnya membawa dampak.

Gambar 1.2 **Pola Sistem pada Penentuan Kebijakan Publik Terhadap Pariwisata Pasca Gempa 27 Mei 2006**

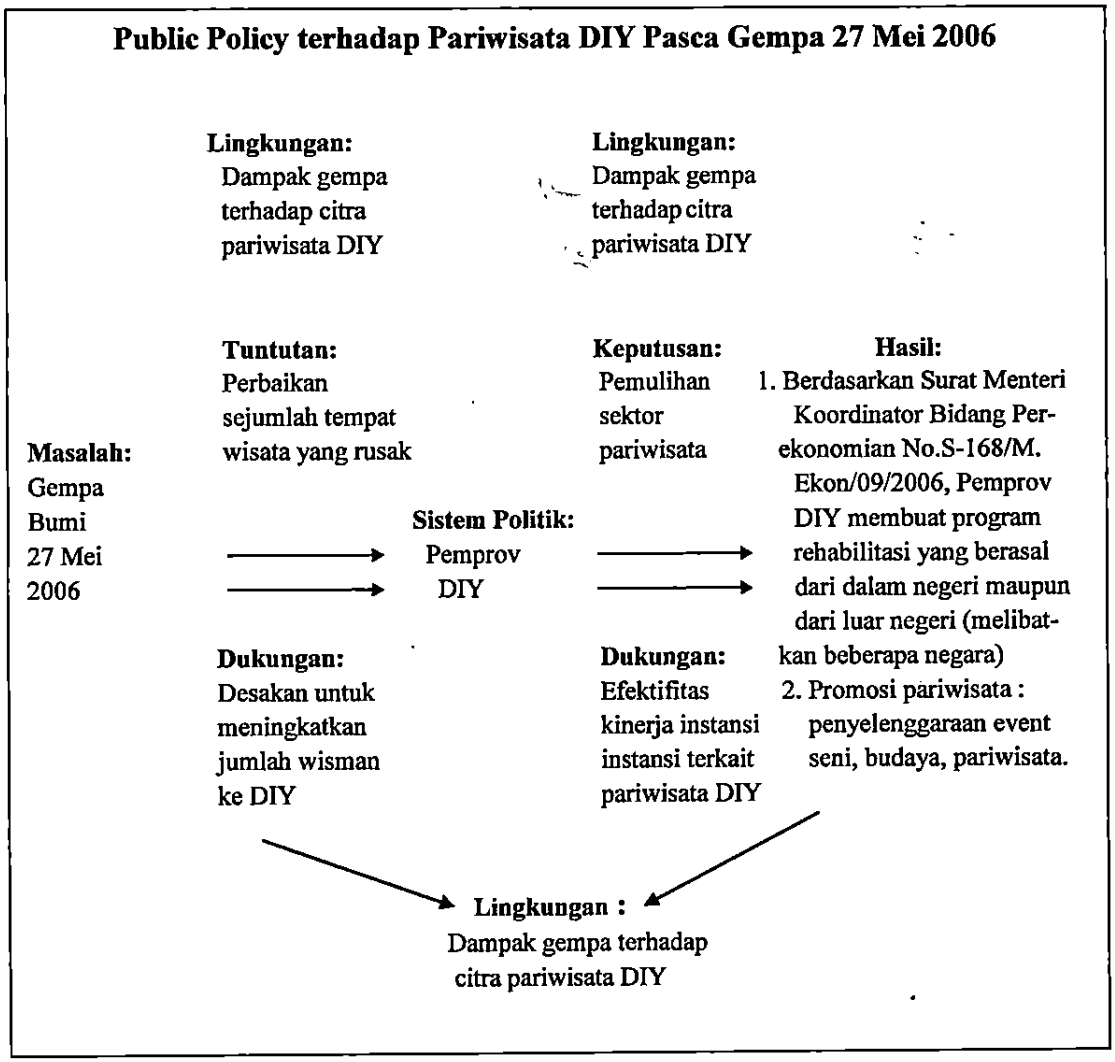

Jika teori ini diaplikasikan, maka dapat diperoleh penjelasan bahwa dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah gempa bumi yang secara tidak langsung membawa dampak terhadap citra pariwisata DIY. Kemudian muncul masukan, tuntutan dan dorongan dari sejumlah daerah tujuan wisata agar Pemerintah Propinsi DIY bertindak cepat dalam pemulihan dan membenahi sejumlah daerah tempat tujuan wisman yang rusak akibat gempa bumi 27 Mei 2006. Masukan atau tuntutan tersebut juga didukung oleh adanya keinginan untuk meningkatkan kembali jumlah wisatawan mancanegara ke DIY pasca gempa. Dalam hal ini, Pemerintah mengadakan sejumlah rapat kerja departemen yang memiliki keputusan untuk melakukan pemulihan sektor pariwisata dengan didukung oleh adanya efektifitas kinerja masing-masing instansi yang berkaitan dengan pariwisata DIY (misalnya: BAPARDA, Dinas Kebudayaan Prov. DIY).

Kemudian, pemerintah merealisasikannya atau membuat kebijakan (sebagai output atau hasil keputusan) yakni dengan berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. S-168/M.Ekon/09/2006 tanggal 8 September 2006, menjadi acuan/ pedoman bagi Pemprov DIY dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pariwisata DIY pasca gempa.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. S-168/M.Ekon/09/2006 tanggal 8 September 2006, sebagai bentuk identifikasi program /kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di bidang pariwisata. kemudian Pemprov membuat

gempa. Program rehabilitasi ini dibagi menjadi 2 yakni: rehabilitasi yang berasal dari dalam negeri dan rehabilitasi yang berasal dari luar negeri.

Rehabilitasi yang berasal dari dalam negeri artinya rehabilitasi ini lebih cenderung spesifik untuk pariwisata DIY dan segera untuk dilaksanakan, misalnya pembentukan Java Tourism Cares (menangani khusus pariwisata DIY pasca gempa), program bantuan pemulihan singkat, rekonstruksi sarana dan prasarana transportasi pasca gempa, penanganan rekonstruksi awal terhadap benda cagar budaya (BCB)/ kawasan cagar budaya (KCB) pasca gempa, serta image recovery.

Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi yang berasal dari luar negeri yakni: rehabilitasi yang diperuntukkan bagi pariwisata DIY, khususnya terhadap sejumlah cagar budaya baik itu kawasan maupun benda cagar budayanya dengan melibatkan/ melakukan kerjasama dengan beberapa negara (seperti Belanda, Jepang, dan sebagainya). Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan pemprov DIY sebagai tindak lanjut dari masukan-masukan/ tuntutan tersebut yakni dengan promosi pariwisata DIY keberbagai negara dan daerah-daerah di Indonesia. Promosi ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi Yogyakarta pasca gempa, khususnya mengenai pariwisata DIY yang sudah aman untuk dikunjungi kembali.

Kegiatan promosi ini dilakukan secara sinergis dengan instansi terkait dalam bentuk pameran, mengadakan event seni, budaya, dan kepariwisataan, maupun travel dialog didalam maupun luar negeri. Media massa merupakan sarana yang efektif

untuk mencapai maksud tersebut, dengan mengundang jurnalis dari beberapa negara asing untuk melakukan perjalanan jurnalistik ke DIY. Sehinggga keberadaan mereka secara tidak langsung dapat membangun citra positif pariwisata Yogyakarta di negara masing-masing, dengan harapan melalui tulisannya mereka mampu membangkitkan minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi obyek wisata DIY.

Berbagai promosi juga dilakukan untuk memulihkan citra positif DIY di mata dunia internasional. Antara lain dengan mengadakan pameran, travel dialog, festival dan kegiatan-kegiatan seni dan budaya DIY di luar negeri. Tidak hanya promosi di mancanegara, pemerintah juga melakukan promosi didalam negeri dengan mengadakan pagelaran-pegelaran kesenian dan budaya. Keseimbangan promosi dalam dan luar negeri ini penting dilakukan, dengan tujuan untuk menciptakan kesan positif dari negara lain bahwa pariwisata DIY benar-benar ingin bangkit sebagai daerah tujuan wisata terkemuka yang siap dan aman untuk dikunjungi oleh siapa saja dan dari negara mana pun.

Disatu sisi, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan feedback atau umpan balik terhadap berbagai tuntutan/ masukan/ dorongan-dorongan dari sejumlah daerah tujuan wisata bahwa pemprov DIY telah menindak lanjuti keinginan-keingan mereka untuk menangani pariwisata DIY pasca gempa 27 Mei 2006. Disisi yang lain, bahwa ditetapkannya kebijakan-kebijakan itu, diharapkan dapat mengembalikan citra pariwisata DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka setelah Bali. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa meningkatnya kembali kepercayaan

para wisatawan mancanegara untuk datang ke DIY akan bertambah sedikit demi sedikit seiring dengan direalisasikannya kebijakan-kebijakan tersebut.

2. Konsep Kerjasama Internasional

Menurut K.J. Holsti, mendefinisikan Kerjasama Internasional adalah sebagai berikut :

> "Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini yang disebut dengan kerjasama."[18]

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, maka semakin pelik pula permasalahan yang akan dihadapi setiap negara. Hal ini tanpa disadari juga menyebabkan meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, dan disisi yang lain meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Begitu juga dengan isu-isu yang memiliki potensial untuk muncul dalam kemajuan pembangunan Indonesia seperti terorisme, flu burung, bencana alam, dan masalah-masalah lainnya, menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun aktor-aktor non pemerintah,

---

[18] K. J Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis II*, Erlangga, Jakarta, 1998, hal 89

sehingga membawa akibat perlu ditingkatkannya peran dari masing-masing pelaku hubungan internasional tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi, mengakomodasi perubahan pola hubungan luar negeri disamping sekaligus menyelaraskan arus global dan berbagai kepentingan nasional dalam setiap level of interst, Indonesia telah mengundangkan UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.[19] Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa :"*Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.*"[20]

Begitu juga dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini (UU No.37/1999 dan UU No.24/2000) memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini juga menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini.[21] Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (*state actors*). UU tentang Hubungan luar negeri tersebut juga

[19] Sambutan menteri luar negeri, Hassan Wirajuda, mengenai revisi buku "Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah 2003".
[20] *Loc.,cit*
[21] *Loc,.cit*

memberikan justifikasi bahwa pemerintah bukanlah lagi satu-satunya lembaga pelaksana hubungan luar negeri. Sebagai contoh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) memberikan kemungkinan Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing.

Dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah menata ulang ruang lingkup dan kewenangan kerjasama luar negeri oleh daerah. Selain itu, lahirnya berbagai peraturan nasional dewasa ini yang memuat aturan lebih rinci dan teknis tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di berbagai bidang melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri telah memantapkan landasan hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang rambu-rambu kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri.

Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang penting pada proses penyempurnaan sistem otonomi daerah yang berkelanjutan yang telah pula membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri. Seperti yang tercantum dalam UU No.34 tahun 2004,[22] pasal 4 ayat 1, huruf f, yang menyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan Pihak luar negeri yang

[22]Penjelasan Atas Undang undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 4 ayat 1, huruf f

terkait dengan kepentingan daerah". Sedangkan huruf g menjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "kerjasama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota "kembar", kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Melihat situasi diatas, maka penjelasan dari konsep kerjasama tersebut dapat diaplikasikan terkait dengan masalah yang muncul terhadap sejumlah sektor kehidupan DIY yakni gempa bumi yang terjadi tanggal 27 Mei 2006 lalu. Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian dan penanganan Pemprov lebih lanjut adalah sektor pariwisata. Yangmana membawa permasalahan yang cukup dilematis akibat dari gempa bumi 27 Mei 2006 lalu. Kondisi terutama pasca musibah bencana alam gempa bumi menyebabkan hampir di semua Kawasan Cagar Budaya seperti Kraton Yogyakarta, Taman Sari, Kotagede, Imogiri, Candi Prambanan, Puro Pakualaman, situs-situs di dalam kondisi bangunan cagar budayanya dalam keadaan rusak berat, dan disamping itu cenderung semakin lama dikhawatirkan akan mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor *biotis, chemis, phisik, mekanik.* Dapat dikatakan bahwa kerusakan benda cagar budaya (BCB) / Heritage pasca gempa, hampir 25,70 % (rusak, berat, sedang), karena bangunan sudah tua / dengan konstruksi tradisional (batu bata, kayu).[23]

[23] http://222.124.164.132/article.php?sid=127423

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemprov DIY sepenuhnya merupakan tanggungjawab oleh Pemda setempat. Mengingat adanya otonomi daerah yang membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, menyebabkan Pemprov DIY kemudian dengan segera melakukan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak (pusat, LSM, Kraton, Dewan Kebudayaan) beserta dengan beberapa negara atau pihak asing melakukan kerjasama guna merehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya terhadap sejumlah kawasan cagar budaya yang sekaligus juga merupakan obyek daya tarik wisatawan. Adapun kerjasama ini bersifat kerjasama teknik yang termasuk bantuan kemanusiaan dan kerjasama berupa hibah.[24]

Kerjasama luar negeri ini misalnya dalam hal penanganan BCB kompleks Masjid Mataram Kotagede, yangmana melibatkan Kyoto Prefecture dengan Pemprov DIY. Kyoto Prefecture melalui JICA memberikan bantuan untuk penanganan Kotagede. Kerjasama antar dua negara ini disetujui dengan penandatanganan dokumen Minutes of Meeting (MOU) kerjasama antara Sekretariat Daerah Provinsi DIY (Ir. Tri Harjunismaji M. Sc) dengan International Affairs Division, Kyoto Prefecture, Jepang (Toru Arima).[25] Sebelumnya, DIY dengan Kyoto Prefecture telah

[24] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) "hibah" berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.[24] Padanan kata "hibah" dalam bahasa Inggris adalah "grant' (dalam jenis kata benda) yang menurut New Webster Dictionary and Thesaurus of the English Language adalah act of granting the property. Pengertian ini dapat dilawankan dengan "pinjaman" dan "utang". Dalam hal ini yang dimaksud hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

[25] Dokumen Biro Kerjasama Propinsi DIY, tahun 2007, hal 2

melakukan kerjasama (*sister province*), yang mana telah terjalin sejak tahun 1985 hingga sekarang. Dan pariwisata merupakan salah satu prioritas dari kerjasama tersebut.

Sedangkan untuk rehabilitasi BCB Kraton Yogyakarta di tahun 2007, Prince Claus Fund melalui JHS membantu 25.000 Euro, Jerman 575 juta rupiah. Sedangkan PUM Heritage Belanda membantu sebesar 40.000 Euro.

Oleh karena itu, dari serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov DIY dengan menggandeng beberapa negara guna merehabilitasi sejumlah cagar budaya yang rusak akibat gempa 27 Mei 2006. Dengan tujuan, rehabilitasi terselesaikan maka juga akan berpengaruh pada meningkatnya kembali kepercayaan wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk berkunjung ke sejumlah obyek dan daya tarik wisata yang ada di DIY. Karena mengingat faktor keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu penentu bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah atau negara tertentu.

F. Hipotesa

Berdasarkan aplikasi dari teori dan pokok permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa adapun strategi pemerintah propinsi DIY lainnya untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara pasca gempa 27 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

1. Dengan berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. S-168/M.Ekon/09/2006 tanggal 8 September 2006, sebagai bentuk

identifikasi program /kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di bidang pariwisata. Kemudian Pemprov DIY membuat program rehabilitasi terhadap pariwisata DIY pasca gempa 27 Mei 2006 yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri (melibatkan/ melakukan kerjasama dengan beberapa negara).

2. Mengadakan promosi pariwisata DIY yang berupa pameran, mengadakan event seni, budaya, dan kepariwisataan, maupun travel dialog didalam maupun luar negeri.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar data yang dikumpulkan tetap relevan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dimana penulis hanya meneliti tentang pariwisata DIY. Dengan kata lain, penelitian hanya terbatas pada aspek pariwisata di lokasi penelitiannya saja yakni data-data yang tersedia di BAPARDA dan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Penulis juga akan meneliti sejauh mana strategi Pemprov DIY dalam meningkatkan kembali arus kunjungan wisatawan mancanegara pasca gempa 27 Mei 2006.

Adapun jangkauan penelitian yang diterapkan penulis yakni dimulai tahun 2002 sampai dengan 2007 (satu tahun pasca gempa). Tetapi tidak menutup kemungkinan pula bagi penulis untuk mencantumkan data-data diluar jangkauan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Lexy J. Moleong, M.A., dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka angka.[26] Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Meskipun demikian, penelitian secara kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Akan tetapi tidak terlalu banyak mendasarkan diri atas data statistik, tetapi memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara untuk mengantar dan mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitiannya.[27]

2. Penelitian Kepustakaan (data sekunder)

Adalah merupakan upaya pengumpulan data dan teori melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang seperti dokumen, kliping, koran, agenda, dan hasil penelitian yang terdapat di Pemerintah Propinsi DIY, dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan DIY dan BAPARDA, yang tentunya memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan data-data yang diperoleh dari berbagai situs internet.

---

[26] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 6.
[27] *Ibid*, hal. 116-117.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan ditampilkan penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi : alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab ini akan membahas Propinsi DIY secara umum, mulai dari letak geografis, iklim, kependudukan, sejarah Yogyakarta, administrasi pemerintahan dan sebagainya. Selain itu, pada bagian bab II ini juga akan dijelaskan potensi dan ruang lingkup pariwisata di DIY dan pengembangannya.

BAB III : Dinamika pariwisata DIY sebelum dan pasca gempa 27 Mei 2006

Pada bagian bab III ini, penulis akan mendeskripsikan keadaan pariwisata DIY sebelum gempa yakni perkembangan pariwisata internasional di DIY. Pasca gempa yakni berupa gambaran mengenai dampak gempa terhadap pariwisata DIY khususnya kerusakan berbagai obyek daya tarik wisata di DIY, serta

pengaruhnya terhadap frekuensi kunjungan wisatawan mancanegara.

BAB IV : Strategi Pemprov DIY dalam usaha meningkatkan kembali arus kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY

Bab ini akan membahas mengenai berbagai strategi yang diambil oleh Pemprov DIY dalam meningkatkan arus kunjungan wisman ke DIY. Singkatnya, dalam sub bab ini akan dibahas mengenai program Pemprov dalam rehabilitasi terhadap pariwisata DIY pasca gempa 27 Mei 2006 baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian pada sub bab berikutnya akan menjelaskan strategi lainnya yakni usaha-usaha Pemprov DIY untuk mempromosikan pariwisatanya didalam maupun diluar negeri. Adapun promosi pariwisata DIY tersebut berupa pameran, mengadakan event seni, budaya, dan kepariwisataan, maupun travel dialog didalam maupun luar negeri.

BAB V : Kesimpulan

Berisikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian. Dan kemudian saran yang sekiranya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan pariwisata di DIY dan di Indonesia pada umumnya.